



**RILIS KUNJUNGAN KERJA (KUNKER) SPESIFIK KOMISI V DPR RI
KE KOTA TARAKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TANGGAL: 12-14 SEPTEMBER 2024**

Komisi V DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 12-14 September 2024, yang dipimpin oleh Bapak **Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO** dari Fraksi PKS. Kunker tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Mitra Kerja Komisi V DPR RI terkait dengan peninjauan Infrastruktur dan Transportasi Kota Tarakan, sekaligus menyerap aspirasi dari Pemerintah Daerah Kota Tarakan maupun masukan-masukan dari Mitra Kerja Komisi V DPR RI.

Dalam kunjungan tersebut, Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR RI melakukan pertemuan dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, PT Pelindo, Pemprov Kaltara, dan Pemkot Tarakan sekaligus melakukan peninjauan lokasi Pelabuhan Malundung. Perlu diketahui bahwa, Kota Tarakan merupakan satu-satunya kota yang berada di ujung utara Pulau Kalimantan tepatnya di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara, selain itu Kota Tarakan juga merupakan wilayah yang terpisah dengan pulau induk Kalimantan Utara serta berbatasan langsung dengan laut Sulawesi. Oleh karena itu, pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi sangatlah diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan Kota Tarakan.

Pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI selaku Ketua Tim Kunker, Sigit Sosiantomo mengatakan pentingnya Pembangunan Sea Wall Pantai Amal guna mengurangi erosi serta membantu mencegah air laut masuk ke area permukiman dan tempat wisata yang berada ditepi pantai, diharapkan agar Pembangunan Sea Wall sepanjang 300 Meter untuk TA 2024 bisa diselesaikan tepat waktu. Komisi V DPR RI juga berharap agar Inpres Jalan Daerah lebih mengutamakan daerah 3T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan) seperti Kota Tarakan maupun Wilayah Kalimantan Utara yang secara umum berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Selain itu, Komisi V DPR RI mendorong Mitra Komisi V DPR dan Pemkot Tarakan agar memanfaatkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT Pelindo untuk pembangunan BSPS, Penataan Kawasan Kumuh, serta Drainase.

Selanjutnya Komisi V DPR RI berharap dengan direvisinya UU Nomor 17 tentang Pelayaran bisa menjadikan Pelabuhan Rakyat sebagai *backbone* ekonomi rakyat, tanpa mengesampingkan Pelabuhan Peti Kemas sebagai Pelabuhan Utama dengan nilai ekonomi yang tinggi. Komisi V DPR RI juga mendesak agar Ditjen Perhubungan Udara perlu melengkapi fasilitas bandara seperti penyediaan garbarata bagi penumpang pesawat, terutama bagi penumpang disabilitas maupun penumpang lanjut usia, serta perlunya membuka kembali rute internasional jika hal tersebut bisa mendatangkan wisatawan asing terutama rute dari/ke Malaysia.

Selain itu, Komisi V DPR RI mengapresiasi kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan yang sudah mengutamakan kontraktor lokal sebagai pemenang tender, hal ini penting untuk pengembangan SDM lokal agar mampu bersaing dengan SDM daerah lain.

TARAKAN, 14 SEPTEMBER 2024

TIM KUNKER SPESIFIK KOMISI V DPR RI